

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Konsep *Resource Sharing***

Pengertian yang paling sederhana atau pada tingkatan paling mendasar dari *resource sharing* adalah penyediaan sumber daya informasi yang telah dikumpulkan dan dikelola oleh lembaga perpustakaan kepada pengguna. Lebih jauh lagi, *resource sharing* mencakup pelaksanaan fungsi perpustakaan, oleh sejumlah lembaga perpustakaan (Usman, 2006). *Resource sharing* juga dapat diartikan sebagai upaya lembaga perpustakaan untuk memastikan setiap pengguna memiliki akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan melalui jalinan kerja sama antar perpustakaan (Abdallah et al., 2023). Menurut Bailey-Hainer et al. (2014), penerapan *resource sharing* pada awalnya terbatas pada layanan seperti pinjaman antar perpustakaan (*interlibrary loan*) dan pengiriman dokumen (*document delivery*).

Seiring berjalannya waktu, fokus *resource sharing* bergeser dari layanan untuk meminta dan mengirimkan sumber daya informasi menjadi layanan yang menyediakan berbagai sumber daya informasi melalui alur kerja yang tergabung dengan proses akuisisi, pengembangan koleksi, referensi, dan layanan perpustakaan lainnya. Selain itu, adanya tekanan untuk meningkatkan ketersediaan sumber daya informasi agar semakin beragam serta menyajikan pengalaman pencarian informasi

yang lebih kaya dan komprehensif mendorong perpustakaan untuk mengakses sumber daya secara bersama. Upaya yang dilakukan perpustakaan seperti mengadakan konsorsium perpustakaan dan menyediakan layanan katalog bersama (Bailey-Hainer et al., 2014).

Menurut Usman (2006), tujuan dilakukannya *resource sharing* adalah untuk memberikan akses yang lebih luas dan untuk menghemat biaya bagi lembaga informasi itu sendiri. Pada era digital, kunci suksesnya suatu perpustakaan bukan lagi bergantung pada kepemilikan sumber daya informasi, melainkan pada akses bersama sumber daya informasi. Beberapa aktivitas yang menjadi perhatian dalam pendekatan *resource sharing* era modern adalah pengiriman dokumen, sistem informasi manajemen perpustakaan bersama, pembuatan *cross-database*, basis data pengabstrakan, dan basis data pengindeksan, serta pembentukan konsorsium perpustakaan.

Berdasarkan beberapa penjelasan *resource sharing* yang telah dipaparkan, dapat dipahami bahwa inti dari *resource sharing* adalah kolaborasi atau kerja sama sejumlah lembaga perpustakaan untuk dapat menjalankan fungsi perpustakaan sesuai ekspektasi pengguna. Kerja sama terutama dilakukan untuk menyediakan akses berbagai jenis sumber daya informasi secara lengkap kepada pengguna. Upaya tersebut meliputi berbagi sumber daya fisik, berbagi sumber daya digital, hingga penyediaan akses secara bersama, baik dalam lingkup daerah, nasional, maupun internasional. *Resource sharing* dengan lingkup nasional memiliki cakupan yang luas, sehingga mendukung pemerataan akses ilmu pengetahuan di

suatu negara, khususnya anggota lembaga yang melakukan kerja sama *resource sharing*.

### **2.1.2 *Resource Sharing* Skala Nasional sebagai Pemerataan Ilmu Pengetahuan**

Menurut Merton (1973), ilmuwan merupakan bagian dari masyarakat, sehingga memiliki kewajiban dan kepentingan yang berkaitan dengan masyarakat pula. Pada praktiknya, perilaku para ilmuwan diatur oleh seperangkat nilai dan norma moral yang disebut sebagai etos ilmu pengetahuan (*the ethos of science*). Nilai dan norma moral ini dapat dilihat dari kebiasaan-kebiasaan para ilmuwan, tulisan-tulisan tentang semangat ilmiah, dan kemarahan moral terhadap pelanggaran atas nilai dan norma tersebut. Pada etos ilmu pengetahuan modern, nilai dan norma moral dibagi menjadi empat, yaitu *universalism*, *communism*, *disinterestedness*, dan *organized skepticism*.

#### 1. *Universalism*

*Universalism* bermakna bahwa setiap klaim ilmiah harus diuji berdasarkan bukti dan logika. Siapa yang membuat klaim bukanlah hal penting, yang penting adalah bukti dan argumennya.

#### 2. *Communism*

*Communism* bermakna bahwa pengetahuan ilmiah merupakan milik seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pengetahuan ilmiah harus dibagikan secara luas agar semua orang dapat memanfaatkan pengetahuan tersebut.

3. *Disinterestedness*

*Disinterestedness* bermakna bahwa ilmuwan bekerja demi mencari kebenaran. *Disinterestedness* didorong oleh mekanisme sosial dan institusional yang tidak memungkinkan bagi ilmuwan untuk melakukan kebohongan.

4. *Organized Skepticism*

*Organized skepticism* bermakna bahwa ilmuwan memiliki kewajiban untuk selalu meragukan, menguji, dan mengkritik semua klaim pengetahuan, termasuk klaim miliknya sendiri. *Organized skepticism* sering menyebabkan perselisihan antara ilmu pengetahuan yang mempertanyakan fakta, termasuk potensi mengenai setiap aspek alam dan masyarakat dengan pandangan lain terhadap aspek yang sama, misalnya dogma-dogma tentang gereja, ekonomi, atau negara.

Prinsip komunalisme (*communism*) yang menekankan pentingnya pemerataan akses pengetahuan bagi seluruh lapisan masyarakat sejalan dengan pandangan berbagai pihak. Penerimaan ini dapat dilihat dari hadirnya berbagai upaya untuk mendorong akses ilmu pengetahuan yang merata, salah satunya adalah akses terbuka (*open access*) oleh kalangan akademik. Akses terbuka sebagai bentuk berbagi karya ilmiah kepada masyarakat terhubung dengan nilai komunisme Merton, walaupun pada saat ini, apa yang perlu dibagikan ditafsirkan secara lebih luas (Hosseini et al., 2024). Menurut Bjork (2004), akses terbuka (*open access*) merujuk pada kondisi di mana pembaca dapat mengakses dan menggunakan

publikasi ilmiah melalui internet, mengunduhnya, atau bahkan menyebarkannya untuk tujuan nonkomersial tanpa pembayaran atau pembatasan yang berarti.

Akses terbuka bermula pada tahun 1990-an, ditandai dengan munculnya berbagai publikasi ilmiah elektronik yang dapat diakses secara gratis. Penyebabnya adalah mahalnya akses publikasi yang disediakan oleh penerbit (*publisher*). Penerbit menerapkan sistem paket publikasi (*bundling*) serta harga yang dinamis (berdasarkan kemauan dan kemampuan pelanggan untuk membayar). Penerapan ini sebagai bentuk strategi pemasaran atas keberadaan internet yang mengurangi biaya faktor produksi secara signifikan. Menurut Oberlander & Reimer (2019), mahalnya akses publikasi serta belum meluasnya akses terbuka berdampak pada lembaga perpustakaan. Lembaga perpustakaan menjadi pihak yang melisensikan konten atas nama penggunaannya, di bawah model berlangganan publikasi, lalu bertindak sebagai pengatur akses konten atas nama pemegang hak.

Selain akses terbuka, upaya lain yang sejalan dengan prinsip komunalisme adalah *resource sharing* (berbagi sumber daya). *Resource sharing* antar peneliti penting untuk dilakukan guna mewujudkan keterbukaan informasi ilmiah seperti yang diusung Merton. Sayangnya, sistem penyebaran karya ilmiah yang saat ini berlaku menjadi hambatan. Sistem seperti akses terbuka emas (*gold open access*) yang mendorong instansi peneliti membayar biaya publikasi menciptakan obsesi peneliti terhadap instansi besar (Chen & Igarashi, 2023). Oleh karena itu sebagai jalan keluarnya, upaya *resource sharing* ini terutama banyak dilakukan oleh lembaga perpustakaan melalui kerja sama seperti konsorsium perpustakaan. Konsorsium perpustakaan dapat diartikan sebagai kolaborasi sekelompok

perpustakaan untuk mewujudkan tujuan bersama yang secara praktik membutuhkan kerja sama dan program berbagi sumber daya informasi. Konsorsium perpustakaan utamanya ditujukan untuk menangani *resource sharing* sumber daya digital atau elektronik karena aspek ini sulit dicapai secara maksimal oleh perpustakaan secara mandiri. Terlebih dengan adanya ledakan informasi (*information explosion*), penyusutan anggaran, keberagaman kebutuhan pengguna, serta tuntutan akses yang cepat dan layanan yang profesional (Uplaonkar & Badiger, 2017).

Menurut Abdallah et al. (2023), konsorsium perpustakaan memungkinkan perpustakaan untuk melakukan *resource sharing* serta melakukan kegiatan di tingkat regional, nasional, bahkan internasional. Keterlibatan pada konsorsium membantu perpustakaan dalam hal yang berkaitan dengan lisensi, berbagi pengetahuan, menangani permasalahan, bermitra dalam repositori bersama dan diskusi. Usman (2006) menambahkan bahwa konsorsium juga membantu dalam menghemat anggaran, terutama terkait pengeluaran dari berlangganan jurnal ilmiah yang mahal. Selain itu, akses jurnal secara bersama meningkatkan akses atau pemerataan ilmu pengetahuan kepada pengguna dari anggota lembaga konsorsium. Pada konsorsium tingkat nasional, lembaga yang memiliki posisi strategis untuk berkontribusi dalam pemerataan akses ilmu pengetahuan adalah perpustakaan nasional.

### **2.1.3 Peran Perpustakaan Nasional dalam Mewujudkan Pemerataan Ilmu Pengetahuan Melalui *Resource Sharing* Skala Nasional**

Perpustakaan merupakan lembaga informasi yang mendukung prinsip komunalisme atau pemerataan akses ilmu pengetahuan. Perpustakaan menyediakan berbagai jenis sumber daya informasi kepada setiap lapisan masyarakat, sehingga setiap individu memiliki kesempatan untuk memanfaatkannya sesuai kebutuhan. Berdasarkan IFLA – UNESCO *Public Library Manifesto 2022*, perpustakaan berkewajiban untuk menyediakan akses gratis dan adil terhadap layanan perpustakaan serta akses berbagai jenis informasi yang dikelola perpustakaan kepada seluruh lapisan masyarakat. Manifesto ini juga menekankan pentingnya lembaga perpustakaan dalam mendukung akses terbuka terhadap pengetahuan ilmiah.

Perpustakaan nasional sebagai perpustakaan dengan ruang lingkup yang luas memiliki peran signifikan dalam mengupayakan pemerataan akses ilmu pengetahuan. Di Indonesia, perpustakaan nasional memiliki tugas untuk mengembangkan koleksi nasional yang memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat. Tugas ini menjadi bentuk pemenuhan hak masyarakat dalam memperoleh layanan serta kesempatan untuk mendayagunakan fasilitas perpustakaan seperti yang tercantum dalam Pasal 5 Ayat 1 UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Perpustakaan nasional dalam menjalankan tugasnya juga perlu untuk berkolaborasi dengan lembaga lain agar dapat menyediakan layanan akses sumber daya informasi yang maksimal bagi pengguna. Mustahil bagi

perpustakaan untuk secara mandiri memenuhi kebutuhan penggunanya, terlebih perpustakaan berskala luas (Abdallah et al., 2023). Oleh karena itu, penerapan *resource sharing* seperti pembentukan konsorsium, pinjaman antar perpustakaan, maupun berlangganan akses bersama penting untuk dilakukan.

Menurut Sridhar (1995), terdapat kesenjangan antara teori *resource sharing*, terutama pada slogan-slogan teoritikal idealis dengan penerapan *resource sharing* di dunia nyata. Pada kajian *resource sharing*, dikenal berbagai macam istilah, seperti perpustakaan tanpa dinding, perpustakaan sebagai jendela akses alih-alih benteng, pergeseran penekanan dari akuisisi ke akses, perpustakaan tanpa kertas, tempat kerja pelajar, dan kepemilikan sumber daya informasi bersama. Sayangnya, istilah-istilah tersebut jarang benar-benar diwujudkan atau dipraktikkan. Mayoritas perpustakaan memerlukan perubahan agar dapat berkembang menjadi perpustakaan sesuai slogan-slogan yang disuarakan oleh para pustakawan.

Kesenjangan ini muncul karena adanya faktor-faktor yang menjadi penghambat kerja sama dan *resource sharing* antar perpustakaan. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut.

1. Tujuan kemandirian lokal dan paradigma kepemilikan (*local self-sufficiency goals and 'ownership paradigm'*)

Paradigma kepemilikan memunculkan anggapan bahwa semakin banyak sumber informasi yang dimiliki perpustakaan, maka akan semakin besar pula peluang temu balik informasi oleh pengguna. Paradigma ini juga mendorong spesifikasi koleksi perpustakaan atau dengan kata lain

perpustakaan berfokus mengumpulkan koleksi sesuai kebutuhan pengguna utama perpustakaan saja dan bergantung kepada perpustakaan lain untuk mengumpulkan suatu sumber yang dianggap tidak penting bagi pengguna utama mereka.

2. Persaingan antar lembaga dan langkah terselubung menuju sentralisasi (*competitiveness of institutions and covert move for centralisation*)

Lembaga-lembaga memiliki kecenderungan untuk menunjukkan sikap persaingan antara satu sama lain. Namun di saat yang sama, juga terdapat kecenderungan tersembunyi untuk melakukan sentralisasi dan menjadikan lembaga masing-masing sebagai pusatnya.

3. Otonomi tindakan yang diinginkan pustakawan (*autonomy of actions desired by librarians*)

Pustakawan cenderung memiliki keinginan untuk bertindak secara mandiri. Keinginan ini dapat muncul akibat adanya ketidakpercayaan terhadap pihak mitra, kurangnya pengetahuan tentang kebutuhan pengguna, ketidakpastian keuangan, perasaan ragu terhadap kemampuan mereka sendiri untuk menepati perjanjian, dan menganggap mitra memiliki perasaan ragu yang sama.

4. Ukuran dan kesadaran status perpustakaan yang mapan (*size and status consciousness of established libraries*)

Semakin besar dan mapan suatu perpustakaan, maka tantangan dalam melakukan *resource sharing* juga akan semakin meningkat. Oleh karena

itu, perpustakaan besar akan memiliki lebih banyak hal untuk dipertimbangkan.

5. Kesulitan dalam mencapai kesepakatan bersama terkait tanggung jawab (*Difficulties in arriving at mutually agreeable collecting responsibilities*)

Pada kerja sama yang melibatkan banyak lembaga, pembagian tanggung jawab bisa menjadi tantangan. Tanggung jawab yang tidak atau kurang sesuai dapat berpengaruh buruk terhadap laju pertumbuhan lembaga yang bersangkutan.

6. Urgensi persyaratan pengguna (*urgency of user requirements*)

Pengguna memiliki preferensi yang cenderung bersifat serba cepat atau dikenal dengan istilah “*Mc Donald’s mentality*”. Mentalitas ini berarti keinginan pengguna untuk mendapat penanganan segera meskipun tanpa adanya keperluan yang benar-benar mendesak (*artificial urgency*). Oleh karena itu, penting untuk dapat memahami tipe mentalitas ini, sehingga dapat memberikan pelayanan yang tepat, terutama bagi pengguna dengan keperluan mendesak yang nyata (*real urgency*).

7. Hambatan psikologis dan sikap egois dari pengguna, pustakawan, dan staf (*psychological and egoistic barriers from users, librarians, and staff*)

Hambatan psikologis dan sikap egois dapat muncul karena penolakan terhadap perubahan (merasa sudah nyaman dengan kondisi saat ini) maupun pandangan bahwa perubahan dapat mengancam status atau adanya perbedaan kepribadian seperti kepribadian kuat dan dominan yang dapat menggerakkan kelompok dengan otoritas yang dimiliki. Hambatan

ini akan menjadi lebih sulit apabila bersifat pasif. Penolakan dilakukan secara halus seolah-olah memberi dukungan namun memberikan alasan untuk tidak berpartisipasi aktif.

8. Kekecewaan karena pengalaman masa lalu (*Discouragement from past experiences*)

Pengalaman kegagalan yang pernah dialami oleh lembaga dapat berdampak terhadap penerimaan lembaga pada program serupa di masa mendatang. Perasaan kecewa akibat kegagalan biasanya disebabkan oleh faktor perubahan minat anggota, kurangnya dana yang memadai, dan kurangnya komunikasi terkait perubahan kepada anggota.

9. Hambatan tradisional/ institusional (*traditional/ institutional barriers*)

Hambatan tradisional/ institusional berkaitan dengan aturan-aturan, prosedur, regulasi, serta keputusan lembaga yang tiap-tiap lembaga bisa tidak seragam (idiosinkratik). Selain itu, hambatan tradisional/ institusional juga mencakup keterbatasan anggaran, berlakunya aturan khusus, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan internal lembaga, dan adanya persaingan kelembagaan.

10. Hambatan fisik dan geografis (*physical and geographical barriers*)

Hambatan fisik dan geografis seperti ruang yang tidak memadai dan jarak fisik dapat berakibat pada praktik *resource sharing*. Selain itu, keterbatasan alat pendukung seperti telepon, transportasi, kurir, katalog gabungan yang tidak aktual dan alat akses lain juga menjadi hambatan tersendiri.

11. Hambatan hukum, politik, dan administratif (*legal, political, and administrative barriers*)

Hambatan hukum, politik, dan administratif meliputi hak cipta, yuridiksi, dan masa transisi perubahan (*initial dual operations*) pada tahap awal. Kondisi-kondisi ini dapat menimbulkan beban ekonomi bagi upaya *resource sharing* dan kerja sama.

Kesebelas faktor penghambat *resource sharing* tersebut berasal dari sisi internal maupun eksternal lembaga. Pada sisi internal, faktor penghambat berkaitan dengan kondisi lembaga, seperti anggaran yang dimiliki, peraturan yang berlaku, serta penerimaan staf. Pada sisi eksternal, faktor penghambat berkaitan dengan penerimaan lembaga lain terhadap *resource sharing*, seperti karena adanya persaingan antar lembaga. Oleh karena itu, penerapan *resource sharing* terutama pada skala nasional memerlukan persiapan yang matang guna memastikan upaya *resource sharing* berjalan dengan baik (Sridhar, 1995).

Perpustakaan nasional memang memiliki peranan signifikan dalam mengupayakan pemerataan akses ilmu pengetahuan di suatu negara, misalnya melalui *resource sharing* skala nasional. Sebagai perpustakaan yang membawahi banyak perpustakaan daerah, perpustakaan nasional lebih mudah untuk mewujudkan sentralisasi akses ilmu pengetahuan yang dapat dimanfaatkan berbagai kalangan masyarakat secara gratis, bebas, dan mudah. Meski demikian, upaya *resource sharing* skala nasional tidak luput dari berbagai tantangan. Tantangan dapat muncul dari berbagai faktor internal maupun eksternal, baik dari pengguna maupun dari pihak pustakawan yang terlibat dalam kerja sama.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, *resource sharing* adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung terwujudnya pemerataan akses ilmu pengetahuan. *Resource sharing* utamanya dilakukan dalam lingkup nasional, sehingga lebih menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Berkaitan dengan *resource sharing* berskala nasional, lembaga yang memegang andil besar atau cocok untuk memegang tanggung jawab adalah perpustakaan nasional, sebab perpustakaan nasional merupakan lembaga yang memiliki fungsi dan tujuan untuk menyediakan pemerataan akses sumber daya informasi secara nasional kepada masyarakat sebagai wujud upaya pemerataan akses ilmu pengetahuan.

## **2.2 Penelitian Sejenis Sebelumnya**

Penelitian berjudul “*Looking for Commitment: Finnish Open Access Journals, Infrastructure and Funding*” yang disusun oleh Ilva (2018) bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan-tantangan yang dihadapi pemerintah Finlandia dalam upayanya membantu jurnal ilmiah nasional beralih ke sistem akses terbuka (*open access*) atau yang dinamai proyek Kotilava. Melalui berbagai kajian literatur yang ada, diperoleh hasil berupa tiga tantangan utama, yaitu pendanaan, infrastruktur, dan komitmen lembaga penelitian seperti universitas. Peralihan jurnal ilmiah berbayar lokal menuju jurnal akses terbuka menekankan perlunya sistem pendanaan baru. Oleh karena itu, proyek Kotilava menawarkan model pendanaan berupa konsorsium nasional, maksudnya lembaga yang tergabung membayar sesuai jumlah artikel yang ditulis oleh peneliti setiap lembaga. Sistem ini juga memberlakukan biaya tetap tahunan bagi setiap lembaga. Berkaitan dengan infrastruktur, proyek Kotilava membangun sistem jurnal nasional, Journal.fi, yang

berfungsi sebagai wadahnya. Meskipun proyek Kotilava menawarkan solusi pengurangan ketergantungan pada penerbit besar, sayangnya tidak semua lembaga penelitian mendukungnya.

Perbedaan antara penelitian Ilva (2018) dengan penelitian ini terletak pada objek yang dikaji. Penelitian Ilva (2018) mengkaji tantangan proyek Kotilava di Finlandia, yaitu proyek jurnal akses terbuka nasional sedangkan penelitian ini mengkaji tantangan realisasi program SATU atau sentralisasi penyediaan akses sumber ilmiah internasional di Indonesia. Proyek Kotilava menekankan kerja sama antara lembaga akademik nasional dalam membantu mewujudkan jurnal ilmiah nasional yang dapat diakses secara bebas. Meskipun penelitian Ilva (2018) dan penelitian ini sama-sama mengkaji upaya penyediaan akses informasi dalam skala nasional, tantangan yang muncul pada proyek Kotilava terbatas pada tantangan internal negara saja, meliputi pendanaan, infrastruktur, dan komitmen lembaga. Berbeda dengan hal ini, program SATU melibatkan penyedia sumber ilmiah dari negara lain, sehingga tantangan yang dihadapi pun lebih luas.

Penelitian sejenis sebelumnya yang kedua adalah penelitian berjudul “Menyoal Akses Terpusat *Online Database* sebagai Basis Kegiatan Keilmuan Perguruan Tinggi” oleh Rifai (2019). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pertimbangan terkait gagasan pemusatan akses sumber informasi elektronik oleh kementerian atau Perpustakaan Nasional. Melalui berbagai kajian literatur yang ada, diketahui bahwa sentralisasi sumber informasi berpotensi membutuhkan biaya yang besar karena beberapa penyedia sumber elektronik cenderung mempertimbangkan pengguna potensial. Terlebih perbedaan kebutuhan pengguna

yang mendorong perlunya keberagaman sumber informasi. Sentralisasi juga menuntut kondisi infrastruktur yang memadai. Permasalahan lain adalah perlunya memastikan kemampuan pengguna agar dapat memanfaatkan sumber informasi secara maksimal. Terakhir, program sentralisasi juga memerlukan adanya evaluasi guna memahami efektivitasnya. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, pilihan yang layak dipertimbangkan adalah dengan mendorong terjalinnya kerja sama berbagi sumber daya antar lembaga yang lebih masif dan kuat.

Perbedaan penelitian Rifai (2019) dengan penelitian ini adalah pada metode yang digunakan. Penelitian Rifai (2019) menggunakan metode studi pustaka atau kajian literatur sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Penggunaan teknik wawancara pada penelitian ini menjadikan hasil penelitian lebih kuat dan relevan. Selain itu, penelitian ini juga bisa dilihat sebagai bentuk pengembangan dari penelitian Rifai pada tahun 2019 mengingat penelitian ini melihat fenomena sentralisasi akses nasional melalui sudut pandang teori komunisme milik Merton tahun 1973 dan teori tantangan *resource sharing* milik Sridhar tahun 1995.

Penelitian sejenis sebelumnya yang ketiga adalah penelitian berjudul “*Impact of the E-Journals of Academic Libraries Consortium on Research Productivity: An Iranian Consortium Experience.*” Penelitian yang disusun oleh Damerchiloo et. al. (2020) ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana sumber daya yang dilanggan konsorsium perpustakaan akademik berdampak pada penyusunan karya ilmiah. Penelitian berfokus pada artikel yang diterbitkan oleh peneliti *Shahid*

*Beheshti University of Medical Sciences (SBMU)* yang terindeks di Scopus dan Web of Science pada tahun 2017. Data yang diperoleh memiliki total sebanyak 3.961 artikel unik. SPSS versi 21 digunakan untuk mengolah data serta untuk melakukan uji ANOVA satu arah dan uji Chi-square untuk menilai hubungan antara cara akses, kualitas jurnal, dan rata-rata sitasi. Berdasarkan analisis, diperoleh hasil bahwa sebesar 40,9% jurnal yang disitasi tersedia di jurnal yang dilanggan konsorsium. Selain itu, sebanyak 70,6% jurnal yang disitasi berasal dari jurnal Q1-Q4 dengan rata-rata sitasi jurnal yang dilanggan adalah 19,11 dengan korelasi ( $r = -0,2$ ). Diketahui jurnal yang disitasi hanya 4.150 (33%) saja dari total 12.497 jurnal yang dilanggan.

Perbedaan penelitian Damerchiloo et al. (2020) dengan penelitian ini adalah metode yang digunakan. Damerchiloo et al. (2020) menggunakan metode kuantitatif untuk mengkaji dampak konsorsium perpustakaan pada penulisan karya ilmiah sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengkaji tantangan realisasi program SATU. Penelitian Damerchiloo et al. (2020) memberikan wawasan terkait efektivitas program sentralisasi atau dengan kata lain dampak program sedangkan penelitian ini mengeksplorasi tantangan yang dihadapi dalam proses realisasi program.

Penelitian sejenis sebelumnya yang keempat adalah penelitian berjudul “*Conundrum of Resource Sharing in Zimbabwe: A Case of Academic Libraries.*” Penelitian yang disusun oleh Chisita & Fombad (2020) ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana *Zimbabwe University Library Consortium (ZULC)* dan *College and Research Libraries Consortium (CARLC)* mampu memenuhi kebutuhan informasi

pengguna mereka. Penelitian juga mengkaji bagaimana perpustakaan akademik, memanfaatkan teknologi dan mengembangkan pinjaman antarperpustakaan (ILL) tradisional. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik *purposive sampling* untuk menentukan informannya. Total terdapat 32 pustakawan akademik yang berasal dari CARLC dan ZULC. Hasil menunjukkan bahwa beberapa tantangan dalam praktik konsorsium meliputi mahal biaya internet, minimnya dana, serta perbedaan sistem otomasi perpustakaan. Oleh karena itu, model yang diusulkan perlu berbasis pada prinsip kesetaraan antar lembaga; kolaborasi lintas konsorsium (ZULC & CARLC); berbagi biaya dan data sesuai kapasitas tiap institusi; dan pemanfaatan WorldCat untuk meningkatkan visibilitas.

Perbedaan penelitian Chisita & Fombad (2020) dengan penelitian ini terletak pada objek yang dikaji. Chisita & Fombad (2020) meneliti konsorsium perpustakaan di Zimbabwe dengan mewawancarai pustakawan dari perpustakaan yang tergabung konsorsium. Berbeda dengan hal tersebut, penelitian ini meneliti realisasi program SATU di Indonesia. Penelitian berfokus pada tantangan yang menghambat proses realisasi program, alih-alih tantangan yang dihadapi ketika program sudah berlangsung seperti yang dilakukan oleh Chisita & Fombad (2020). Namun, penelitian ini juga tidak menutup kemungkinan untuk mengkaji potensi tantangan yang akan dihadapi ketika program sudah berjalan.

Penelitian sejenis sebelumnya yang kelima ditulis oleh Rao (2025) dengan judul “*One Nation One Subscription (ONOS) Initiative: SWOT Analysis.*” Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji inisiatif ONOS di India beserta implementasinya dari berbagai perspektif untuk mengatasi tantangan seperti

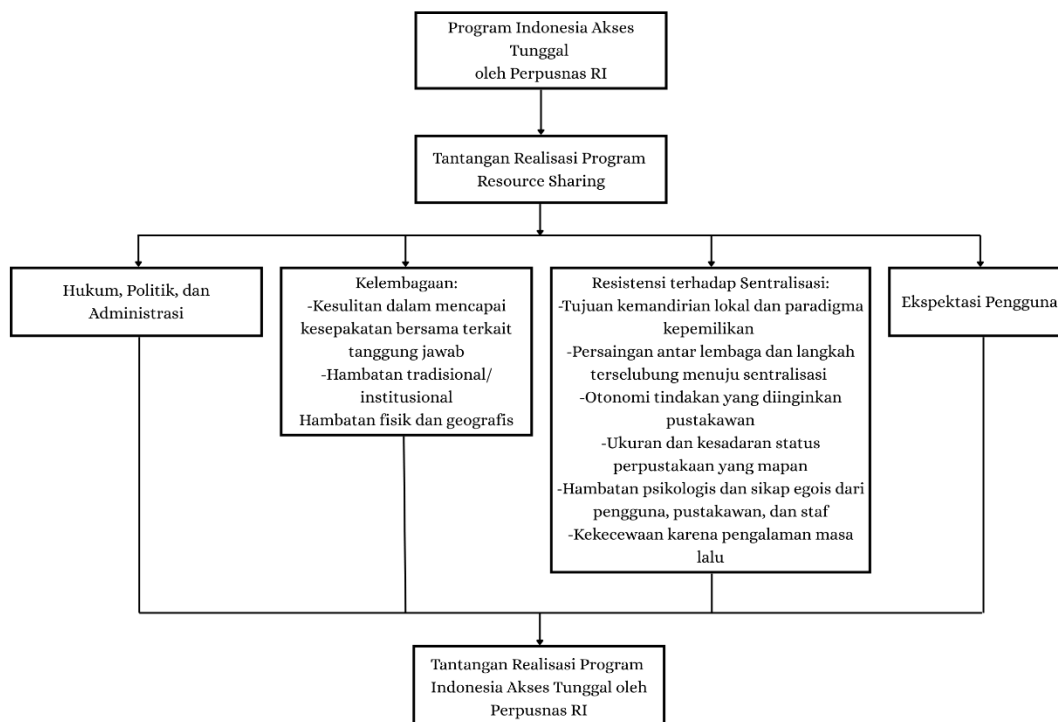
menjembatani kesenjangan digital, menutup kesenjangan sumber daya digital, menghilangkan disparitas pendidikan, menghilangkan hambatan bahasa, dan meminimalkan hambatan finansial, terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, and threats*). Hasil analisis menunjukkan bahwa ONOS memberikan manfaat melalui penyediaan akses ke 13.119 publikasi internasional bagi lembaga di India, meningkatkan produktivitas dan kolaborasi ilmiah, terutama di daerah tertinggal, serta membantu menjembatani kesenjangan digital dan finansial. Meskipun demikian, ONOS masih perlu mengupayakan efisiensi biaya yang lebih baik, mengupayakan keterlibatan penerbit lokal, dan mengupayakan penguatan akses terbuka dan pendanaan biaya pemrosesan artikel (APC).

Perbedaan penelitian Rao (2025) dengan penelitian ini terletak pada metode analisis yang digunakan. Rao (2025) melakukan analisis SWOT pada program ONOS di India yang sudah mulai berjalan pada tahun 2025. Analisis SWOT memberikan wawasan mengenai faktor internal dan eksternal guna menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan strategi. Berbeda dengan hal tersebut, penelitian ini melakukan analisis tantangan dari perspektif teori Sridhar tahun 1995 guna memberikan wawasan terhadap hambatan realisasi program SATU di Indonesia. Penelitian ini mengkaji tantangan pada proses realisasi program, sehingga hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mewujudkan program yang lebih baik.

Berdasarkan penejelasan yang telah dipaparkan, penelitian ini mengkaji program SATU di Indonesia, yang mana berbeda dengan penelitian Ilva (2018), Damerchiloo et al. (2020), Chisita & Fombad (2020), dan Rao (2025). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Rifai (2019) terletak pada metode yang digunakan. Berbeda dengan Rifai yang menggunakan metode studi literatur, penelitian ini menggunakan teknik wawancara sebagai metode pengumpulan data penelitiannya. Selain itu, penelitian ini juga melihat fenomena SATU melalui teori komunisme dari Merton tahun 1973 dan teori tantangan *resource sharing* dari Sridhar tahun 1995. Hal tersebut menjadi potensi keterbaruan hasil penelitian ini.

## **2.2 Kerangka Pikir**

Penelitian ini mengkaji mengenai tantangan yang dialami oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dalam merealisasikan program Indonesia Akses Tunggal. Adapun alur penelitian ini disusun berdasarkan kerangka pikir seperti bagan berikut ini:



**Bagan 2. 1 Kerangka Pikir**

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya inisiasi program Indonesia Akses Tunggal (SATU) oleh Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi (Ditjensaintek) yang menggandeng Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI) pada tanggal 12 Maret 2025 (Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi, Kemdiktisaintek, 2025d). Saat ini, baru sebanyak 7 ribu dari 191 ribu perpustakaan yang sudah terhubung dalam program sentralisasi ini (Nisa, 2025). Keadaan ini mengindikasikan bahwa terdapat tantangan-tantangan yang dihadapi dalam merealisasikan program. Sebagai program *resource sharing* berskala nasional, tantangan-tantangan yang dialami dalam merealisasikan program SATU dapat dilihat berdasarkan empat aspek. Aspek yang pertama adalah hukum, politik, dan administrasi, sedangkan aspek yang kedua adalah kelembagaan, aspek yang ketiga

adalah resistensi terhadap sentralisasi, dan aspek yang terakhir yaitu ekspektasi pengguna. Berdasarkan aspek-aspek tersebut dapat diketahui wujud tantangan-tantangan dalam merealisasikan program Indonesia Akses Tunggal (SATU) oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.